

Disparitas Pendapatan Asli Desa (PADes) dan Pengelolaan Keuangan Dana Desa

I Putu Fery Karyada*¹, Putu Cita Ayu², I Gede Aryana Mahayasa³

Program Studi Akuntansi
Universitas Hindu Indonesia
Denpasar, Indonesia

e-mail: karyada_fery@unhi.ac.id*¹, citaayu09@unhi.ac.id²,
aryanamahayasa@unhi.ac.id³

Abstrak

Riwayat Artikel
Tanggal diajukan:
11 November
2020

Tanggal diterima :
2 Desember 2020

Tanggal
dipublikasikan:
18 Desember
2020

Dana desa telah banyak dimanfaatkan untuk meningkatkan jumlah pendapatan asli desa. Namun pada saat ini, terdapat kesenjangan PADes yang cukup tinggi antar desa. Tujuan penelitian ini adalah untuk melakukan analisis tentang PADes dan pengelolaan keuangan dana desa. Metode penelitian menggunakan deskriptif. Pemerolehan data dilakukan menggunakan survei dan melakukan wawancara secara langsung kepada perbekel (kepala desa). Hasil penelitian menyatakan bahwa sumber pendapatan asli desa paling banyak terdiri hasil usaha desa di bidang pariwisata. Sedangkan untuk yang PADes kecil, mayoritas tidak dapat memanfaatkan potensi desa sehingga sumber PADes nya dari bunga bank. Selain itu, perbedaan jumlah PADes dikarenakan tingkat pemanfaatan dana desa pada indikator pemanfaatan potensi lokal dan pemberdayaan masyarakat. PADes desa tinggi karena dana desa telah fokus terhadap program pemanfaatan potensi lokal dan pemberdayaan masyarakat.

Kata Kunci: dana desa; PADes; pengelolaan keuangan

Abstract

Pengutipan:
Karyada, I. P. F.,
Ayu, P. C., &
Mahayasa, I. G.
A. (2020).
Disparitas
Pendapatan Asli
Desa (PADes)
dan Pengelolaan
Keuangan Dana
Desa. *Jurnal
Pendidikan
Ekonomi
Undiksha*, 12(2),
282–288

Dana Desa have been widely used to increase the village income. However, at present, there is a fairly high PADes gap between villages. This study aim to analyze PADes and financial management of Dana Desa. The research method uses descriptive. Data was collected using surveys and direct interviews with the Perbekel (headman). The results of the study stated that the PADes consisted mostly of village business in the tourism sector. Whereas for the small PADes, they could not take advantage of the village potential so that the source of PADes was from bank interest. In addition, the difference in PADes is due to utilization of Dana Desa on indicators of local potential utilization and community empowerment. Village PADes is high because Dana Desa have focused on programs of utilizing local potential and community empowerment.

Keywords: *dana desa; financial management; PADes*

PENDAHULUAN

Sejak tahun 2015, desa telah mengalami perubahan paradigma ketika

diimplementasikannya Undang-Undang No 6 Tahun 2014 yang dikenal dengan Undang-Undang Desa. UU Desa digunakan sebagai

pedoman membentuk desa yang mandiri secara politik dan ekonomi yang memiliki landasan sosial, budaya dan kearifan lokal yang kuat. Pemerintahan desa adalah lembaga desentralisasi pemerintah pusat yang berperan utama untuk mengatur masyarakat desa dan keberhasilan pembangunan nasional (Rafsanjani, 2013). Desa diberikan otonomi yaitu kemampuan masyarakat desa untuk mengatur dan melaksanakan dinamika kehidupan dengan didasarkan atas kemampuan sendiri (Nadir, 2013). Untuk mendukung tujuan tersebut, hingga saat ini Desa telah diberikan akses pendanaan rutin setiap tahunnya yang dikenal dengan Dana Desa.

Pemberlakuan otonomi memiliki konsekuensi bahwa pemerintah daerah otonom harus mampu mandiri dalam hal arah kebijakan dan pembiayaan program pembangunan (Halim, A., & Iqbal, 2012).

Oleh karena itu, desa seharusnya mampu melaksanakan perencanaan, menggali, mengelola, dan menggunakan sumber keuangannya sendiri sesuai dengan potensi lokal yang dimiliki. Dalam konteks tersebut, kebijakan dan strategi pembangunan pedesaan seharusnya memperhatikan tiga karakteristik pedesaan yaitu Pertama, masyarakat desa terbentuk dari tatanan sosial yang telah melandasi dalam kehidupannya. Kedua, adanya asumsi *gab* tentang ekonomi desa dan kota. Ketiga, terciptanya pola hubungan antar masyarakat yang kuat dan tidak mudah dihilangkan (Sastratmadja, 2009).

Kemandirian desa dapat terwujud ketika pemerintah Desa mampu mengelola dana desa sehingga dapat meningkatkan pendapat asli desa. Berdasarkan pemetaan awal Pendapatan Asli Desa (PADes) seluruh desa di Bali, didapatkan asli sebagai berikut.

Tabel 1. Daftar PADes Desa Tertinggi (dalam Rupiah)

Desa	2015	2016	2017	2018	Total PADes
Pecatu	13,510,245,739	13,510,245,739	285,150,000	35,000,000	27,340,641,478
Kutuh	12,526,073,960	21,500,000	6,794,000,000	196,229,311	19,537,803,271
Dalung	7,961,046,000	5,991,429,000	387,180,000	172,000,000	14,511,655,000
Pangsan	3,284,700,000	9,853,632,000	11,500,000	10,000,000	13,159,832,000
Belok Sidan	3,996,659,196	4,725,879,445	50,535,609	3,919,706,784	12,692,781,034

Sumber: Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Bali

Berdasarkan tabel 1, lima desa dengan PADes tertinggi berada di Kabupaten Badung. Hal tersebut dikarenakan Kabupaten Badung merupakan daerah yang banyak memiliki potensi wilayah ekonomi pariwisata. Bali yang terkenal dengan pariwisatanya tentu tidak sulit bagi desa tersebut untuk mengoptimalkan potensi yang dimilikinya. Namun, disisi lain masih banyak terdapat desa di Bali yang belum mampu mengelola

wilayahnya untuk meningkatkan PADes. Rata-rata jumlah PADes yang ditentukan dari total PADes dibagi jumlah desa mendapat yaitu sebesar Rp 441,868,773. Dari total 636 Desa, hanya 91 Desa (14%) yang berada pada tingkat PADes di atas rata-rata. Hal tersebut menggambarkan bahwa masih terjadi ketimpangan pengelolaan ekonomi desa di Bali

Tabel 2. Daftar PADes Desa Terendah (dalam Rupiah)

Desa	2015	2016	2017	2018	Total PADes
Kerta Buana	1,000,000	500,000			1,500,000
Tianyar	1,000,000				1,000,000
Kalianget	250,000				250,000
Celukanbawang				0	0
Tianyar Tengah				0	0

Sumber: Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Bali

Data diatas menerangkan Desa dengan PADes terendah mayoritas berada di Kabupaten Karangasem dan dua desa di Kabupaten Buleleng yaitu Desa Celukanbawang dan Desa Kalianget. Kosongnya angka PADes di desa tersebut kemungkinan oleh pemerintah desa belum melaporkan dan/atau desa tersebut belum memiliki PADes. Anomali hasil ini juga diperkuat oleh jumlah dana desa yang dimiliki Kabupaten Karangasem dan Buleleng lebih banyak dari Kabupaten Badung, sehingga seharusnya mampu menghasilkan PADes yang sesuai dengan anggaran dana desa.

Berdasarkan definisi dari UU Desa, Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa. Pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut dapat menimbulkan pendapatan, belanja, pembiayaan, dan pengelolaan keuangan desa.

Salah satu faktor yang menentukan kemandirian desa adalah mampu menghasilkan pendapatan asli desa. Pendapatan asli desa merupakan pendapatan dari optimalisasi potensi desa. Mengacu pada UU no. 6 tahun 2016 tentang Desa, pasal 72 ayat (1) menjelaskan bahwa pendapatan asli desa dapat bersumber hasil usaha, hasil aset, swadaya dan partisipasi, gotong royong, dan lain-lain pendapatan asli Desa.

Peraturan Kementerian Desa Nomor 5 Tahun 2015 Pasal 5 menjelaskan tentang prioritas dana desa seperti pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana, pengembangan ekonomi lokal, dan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan yang berkelanjutan. Prioritas penggunaan Dana Desa untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat agar dapat meningkatkan kesejahteraan, peningkatan kualitas hidup masyarakat serta pengentasan kemiskinan (Karyada et al., 2020).

Berdasarkan pemaparan tersebut, penelitian ini mengkaji sumber-sumber pendapatan asli desa dan analisis

pengelolaan dana desa. Pengelolaan keuangan dana desa yang baik seharusnya mampu mengelola potensi desa sehingga dapat meningkatkan pendapatan asli desa. Pentingnya mengkaji fenomena ini karena dapat memberikan deskripsi lanjutan terkait kondisi pengelolaan keuangan desa dan juga dapat dijadikan bahan evaluasi penggunaan dana desa.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif, yaitu menganalisis dan mendeskripsikan data tanpa bermaksud melakukan generalisasi (Sugiyono, 2014). Penelitian mendeskripsikan sumber pendapatan asli desa dan juga menganalisis pengelolaan keuangan dana desa. Subyek penelitian adalah desa dengan Pendapatan Asli Desa (PADes) tinggi dan rendah yang masing-masing diwakili oleh lima desa. Penggunaan jumlah tersebut agar mampu dianalisis secara intensif.

Terdapat dua variabel penelitian yaitu Sumber Pendapatan Asli Desa (PADes) dan Pengelolaan Keuangan Dana Desa. Pendapatan asli desa adalah sumber pendapatan dari hasil usaha, hasil aset, swadaya dan partisipasi, gotong royong, dan lain-lain pendapatan asli Desa. Pengelolaan Keuangan Dana Desa ditentukan menggunakan indikator dari Peraturan Kementerian Desa Nomor 5 Tahun 2015 Pasal 5 yaitu pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana, pengembangan ekonomi lokal, serta pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan yang berkelanjutan.

Pemerolehan data dilakukan menggunakan survei dan melakukan wawancara secara langsung kepada perbekel (kepala desa) tentang sumber pendapatan asli desa dan pengelolaan keuangan desa. Wawancara dilakukan dengan *indept interview* menggunakan bantuan kuesioner. *Interview* digunakan dengan cara tatap muka langsung, telephone dan daring online (*zoom*). Adapun indikatornya yang telah dipergunakan sebagai berikut.

Tabel 3. Indikator Penelitian

Dimensi	Indikator
Prioritas Pemenuhan Kebutuhan Dasar	1. Pos Kesehatan dan Polindes 2. Pengelolaan dan Pembinaan Posyandu 3. Pengelolaan dan Pembinaan PAUD
Prioritas Pembangunan Sarana dan Prasarana	1. Jalan Desa 2. Jalan Usaha 3. Embung Desa 4. Sanitasi Lingkungan 5. Pengelolaan Air Bersih (Skala Desa) 6. Irigasi (Tersier)
Prioritas	1. BUMDes 2. Pembuatan pupuk dan pakan (organik) 3. Pasar Desa atau kios desa 4. Pelelangan ikan (yang dimiliki desa) 5. Lumbung pangan desa 6. Benih local 7. Ternak kolektif 8. Energi Mandiri 9. Tambatan perahu 10. Padang gembala 11. Desa wisata 12. Teknologi tepat guna
Pemanfaatan Sumber daya Alam dan Lingkungan yang Berkelanjutan	1. Tambang Mineral Bukan Logam 2. Tambang Batuan 3. Rumput Laut 4. Hutan Milik Desa 5. Sampah
Prioritas Penggunaan Dana Desa untuk Pemberdayaan Masyarakat Desa	1. Perencanaan 2. Mendukung kegiatan ekonomi 3. Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa 4. Pembentukan dan fasilitasi paralegal 5. Promosi kesehatan 6. Dukungan Hutan Desa dan Hutan Kemasyarakatan 7. Peningkatan kapasitas kelompok masyarakat
Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan	1. Penggunaan Rekening Desa 2. Dokumen sah 3. RAB diketahui Sekdes 4. Buku Kas
Kegiatan Penatausahaan	Menggunakan buku bank, buku kas pembantu pajak, buku kas umum Pertanggungjawaban bendahara
Pelaporan dan Pertanggungjawaban	1. Kepala desa menyampaikan kepada Bupati atau Walikota meliputi Laporan realisasi pelaksanaan APBDe setiap semester, Laporan Kekayaan Milik Desa, Laporan Program yang masuk desa 2. Informasi Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa

Sumber: (Inten & Liliana, 2017)

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil survey yang telah dilakukan, terdapat 10 desa yang dijadikan

responden sesuai dengan kategori PADes tinggi dan PADes Rendah. Adapun rincian nama desa adalah sebagai berikut.

Tabel 4. Subyek Penelitian

PADes Tinggi	PADes Rendah
1. Sanur Kaja	1. Pemecutan Kelod
2. Subamia	2. Cepaka
3. Tulikup	3. Suwug
4. Sanur Kauh	4. Tegal Jadi
5. Jatiluwih	5. Batanyuh

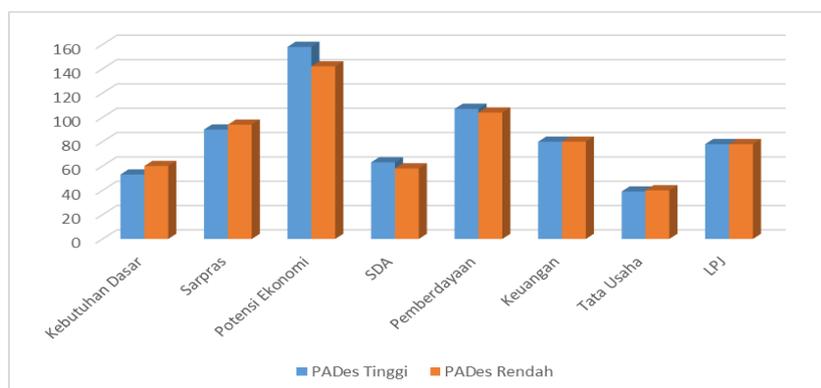
Berdasarkan hasil wawancara, sumber pendapatan asli desa paling banyak terdiri dari hasil usaha desa di bidang pariwisata. Sedangkan untuk yang PADes kecil, mayoritas tidak dapat memanfaatkan potensi desa sehingga sumber PADes nya dari bunga bank. Strategi pengelolaan keuangan dana desa masih digunakan untuk kebutuhan dasar dan infrastruktur. Kondisi ini dikarenakan desa belum memiliki kreatifitas dalam merencanakan pembangunannya. Pada umumnya desa dengan PADes kecil hanya mengikuti instruksi kebijakan dari pemerintah pusat. Terkadang desa melakukan perbaikan sarana dan infrastruktur yang kondisinya masih baik karena tidak memiliki inovasi kebijakan. Hanya sedikit desa yang memanfaatkan dana desa untuk fokus kepada kegiatan pengelolaan potensi desa dan pemberdayaan.

Minimnya PADes juga dikarenakan tidak mampunya pemerintah desa dalam mengelola potensi ekonominya. Jika kita mengkaji lebih luas, desa seharusnya memiliki potensi ekonomi yang sangat besar untuk dikembangkan. Terjadi ketimpangan karena sumber daya alam yang luas ini tidak diimbangi dengan kualitas sumber daya manusianya. Hal ini berakibat banyak

potensi desa yang tidak dikembangkan secara maksimal dan terjadi stagnansi perekonomian desa (Karyada, 2020).

Potensi desa memiliki dimensi yang sangat luas dan tidak mungkin sama dengan wilayah lain. Kalaupun memiliki potensi hampir sama, masih tetap membutuhkan penyesuaian dengan karakter warganya. Masyarakat desa umumnya tidak menyadari potensi yang dimilikinya dan berpikiran bahwa desa mereka tidak memiliki daya tarik. Asumsi seperti itu muncul karena masyarakat menggunakan sudut pandang sebagai penduduk yang telah sangat lama tinggal di wilayah tersebut. Mereka tidak mampu melihat dari sudut pandang seperti anak perkotaan dan juga orang luar negeri yang memandang desa sebagai objek yang layak dan menarik dikelola (Suryanto, 2018).

Selain potensi yang dimiliki, desa juga harus mampu memanfaatkan pengelolaan dana desa agar dapat menunjang program yang berkaitan dengan pengembangan potensi desa. Pada umumnya, desa yang mampu memanfaatkan dana desa ke arah pemanfaatan potensi dan pemberdayaan memiliki jumlah PADes yang tinggi. Hal ini terlihat pada grafik pengelolaan dana desa di bawah ini.



Gambar 1. Pengelolaan Keuangan Dana Desa

Gambar 1 memperlihatkan bahwa dari delapan indikator, menyatakan bahwa desa yang memiliki PADes rendah dikarenakan penggunaan dana desa masih pada pemenuhan kebutuhan dasar dan pembangunan sarana prasarana. Berbeda dengan desa yang memiliki PADes tinggi lebih fokus penggunaan dana desa untuk pemanfaatan pengelolaan potensi ekonomi

dan pemberdayaan. Untuk indikator yang lainnya, tidak terdapat perbedaan antara desa dengan memiliki PADes tinggi dan PADes rendah. Desa yang telah menyadari pentingnya potensi ekonomi dan pemberdayaan akan lebih cepat berkembang.

Perlu juga disadari bahwa kualitas SDM sangat menentukan kemajuan desa.

Dalam jangka panjang, generasi muda merupakan potensi desa yang harus dikembangkan. Pentingnya peningkatan potensi generasi muda karena pemuda merupakan aset terbesar bangsa dan sekaligus menjadi inovator dalam mewujudkan cita-cita bangsa (Karyada, 2018). Pengembangan potensi desa ini harus menjadi modal ketertarikan generasi muda untuk melakukan *value added* terhadap kondisi desa (Suleman et al., 2020).

Selama proses mendapatkan informasi, terdapat beberapa hal yang dapat diketahui tentang alasan rendahnya pemanfaatan potensi ekonomi desa. Pertama, kepala desa tidak mempunyai kreatifitas dan inisiasi yang kuat untuk menggerakkan masyarakat dalam mengelola potensi lokal. Kedua, Desa disibukkan mengelola dana dari pemerintah yang umumnya belum fokus terhadap pembangunan ekonomi kolektif. Ketiga, pembangunan desa kurang sensitif pada gerakan ekonomi lokal. Hal yang paling mendasar adalah kualitas SDM dan kurangnya pendampingan kepada desa.

Dalam membangun desa juga tidak dapat dilakukan hanya dari satu sektor, perlu adanya dukungan dari stakeholder lainnya (Suharyanto & Sofianto, 2012). Keberhasilan pembangunan desa ditentukan oleh sinergitas beberapa pihak. Pemerintah (pusat, provinsi, kabupaten) konsisten dan fokus dalam merumuskan kebijakan, menentukan program, implementasi program dan proses monitoring dan evaluasi yang terpadu. pemerintah desa menentukan kebijakan berdasarkan identifikasi potensi, membangun koordinasi dan sinkronisasi serta mengutamakan pemberdayaan masyarakat. Masyarakat dan lembaga kemasyarakatan aktif berpartisipasi untuk melakukan pengawasan. Akademisi mendukung dengan menggunakan iptek dan pendampingan. Pelaku usaha dapat melakukan investasi dan kerjasama dengan unit usaha desa.

Kolaborasi seperti itu sangat dibutuhkan agar desa dapat fokus terhadap produktifitas dalam pengembangan potensinya. Setiap desa juga idealnya dapat menentukan satu potensi unggulan yang

akan fokus dikembangkan. Kedepannya akan tercipta konsep *one village, one product*.

SIMPULAN DAN SARAN

Sumber pendapatan asli desa paling banyak terdiri hasil usaha desa di bidang pariwisata. Sedangkan untuk yang PADes kecil, mayoritas tidak dapat memanfaatkan potensi desa sehingga sumber PADes nya dari bunga bank. Selain itu, perbedaan jumlah PADes dikarenakan tingkat pemanfaatan dana desa pada indikator pemanfaatan potensi lokal dan pemberdayaan masyarakat. PADes desa tinggi karena dana desa telah fokus terhadap program pemanfaatan potensi lokal dan pemberdayaan masyarakat.

Saran penelitian ini adalah perlunya ada perhatian dari beberapa pihak yaitu Pemerintah, Akademisi, dan Masyarakat (Industri) untuk kemajuan Desa. *Stakeholder* tersebut dapat melakukan kerjasama untuk melakukan pembinaan kepada desa.

DAFTAR RUJUKAN

- Halim, A., & Iqbal, M. (2012). *Pengelolaan Keuangan Daerah*. Unit Penerbit dan Percetakan Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YPKN.
- Inten, M., & Liliana. (2017). Pengelolaan Keuangan Dana Desa. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, 336–352. <https://doi.org/10.18202/jamal.2017.08.7058>
- Karyada, I. P. F. (2018). Peningkatan Keaktifan Organisasi Pemuda Melalui Pelatihan Dasar Kepemimpinan (Program Pengabdian Di Desa Rejasa, Kecamatan Penebel, Kabupaten Tabanan). *JURNAL SEWAKA BHAKTI*, 1(1), 8–20.
- Karyada, I. P. F. (2020). Analisis Pendapatan Asli Desa Setelah Penetapan UU No 6 Tahun 2014 Tentang Desa. *Jurnal Akuntansi Profesi*, 11(1), 178–182.
- Karyada, I. P. F., Ayu, P. C., & Mahayasa, I. G. A. (2020). Pola Dan Peta Kemampuan Keuangan Desa Setelah Penerbitan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. *E-Jurnal*

- Akuntansi*.
<https://doi.org/10.24843/eja.2020.v30.i03.p17>
- Nadir, S. (2013). Otonomi Daerah dan Desentralisasi Desa: Menuju Pemberdayaan Masyarakat Desa. *Jurnal Politik Profetik*, 1(1), 2013. <https://doi.org/10.24252/jpp.v1i1.1621>
- Rafsanzani, H. (2013). Kemitraan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD) Dengan Kepala Desa Dalam Perencanaan Pembangunan Desa (Studi Di Desa Sumber Ngepoh Kecamatan Lawang Kabupaten Malang). *Jurnal Administrasi Publik Mahasiswa Universitas Brawijaya*.
- Sastraatmadja, E. (2009). *Desa Membangun* (14 (2)). Warta Bappeda.
- Sugiyono. (2014). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.
- Suharyanto, S., & Sofianto, A. (2012). Model Pembangunan Desa Terpadu Inovatif di Jawa Tengah. *Jurnal Bina Praja*. <https://doi.org/10.21787/jbp.04.2012.251-260>
- Suleman, A. R., Revida, E., Soetijono, I. K., Siregar, R. T., Syofyan, S., Hasibuan, A. F. H., & Syafii, A. (2020). *BUMDES Menuju Optimalisasi Ekonomi Desa*. Yayasan Kita Menulis.
- Suryanto, R. (2018). *Peta Jalan BUMDEs Sukses*. PT. Syncore Indonesia.